

DAFTAR PUSTAKA

Buku, Karya Tulis, Sumber lainnya

CR, P. Y. P. (2019). Pengaturan Sistem Pemungutan Pajak Pertambahan Nilai dan Pemotongan Pajak Penghasilan serta Pelaporannya Dalam Mendorong Pengadaan Barang Dan/Jasa yang Lebih Baik. (*Doctoral dissertation*, UAJY).

Direktorat Jenderal Pajak. (2013). *PPh Pajak Penghasilan*. Jakarta.

Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah (LKPP). (2011). “Senarai Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah”, *Jurnal Pengadaan*. Vol.1, no. 1.

Sugiyono. (2012). *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta. Hal. 291.

Peraturan atau Dokumen Publik

Menteri Keuangan. (2017). Peraturan Menteri Keuangan Nomor 34/PMK.010/2017 tentang Pemungutan Pajak Penghasilan Pasal 22 sehubungan dengan Pembayaran atas Penyerahan Barang dan Kegiatan di Bidang Impor atau Kegiatan Usaha di Bidang Lain.

Pemerintah Kabupaten Tapanuli Utara. (2016). Peraturan Bupati Tapanuli Utara No. 64 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Pertanian Kabupaten Tapanuli Utara

Pemerintah Republik Indonesia. (2018). Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.

Pemerintah Republik Indonesia. (2021). Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.

Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang Jasa Pemerintah. (2021). Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang Jasa Pemerintah Nomor 12 Tahun 2021 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Melalui Penyedia.

Republik Indonesia. (2007). Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2007 tentang perubahan ketiga Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan.

Republik Indonesia. (2021). Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan.